

SEKTOR JASA KEUANGAN KOKOH HADAPI POTENSI PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

“Stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga mampu menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global”

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- The Fed mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 75 bps di 2024.
- Pasar masih mencermati perkembangan geopolitik ke depan, seperti eskalasi ketegangan di laut merah dan pemilihan umum di beberapa negara utama.
- Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed mendorong kembalinya aliran dana masuk ke *Emerging Markets* (EM) dan penguatan pasar keuangan global.
- Volatilitas di pasar saham, surat utang, maupun nilai tukar terpantau menurun.

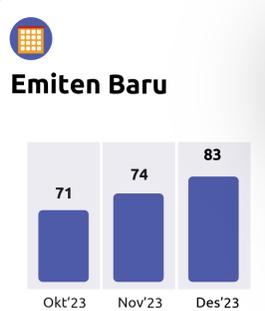
Domestik

- Tingkat inflasi terjaga rendah di level 2,61% yoy.
- Leading indicators* perekonomian nasional masih cukup positif, diantaranya surplus neraca perdagangan dan ekspansif PMI Manufaktur.
- Masih perlu dicermati perkembangan permintaan domestik ke depan.



PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

PASAR MODAL



Securities Crowdfunding (SCF)

16 penyelenggara berizin OJK
Rp 1,04 Triliun total dana yang dihimpun



494 penerbit
168.068 pemodal

Desember 2023

Rp30,91 miliar Total Nilai Perdagangan

Perdagangan Karbon

26 September s.d 29 Desember 2023

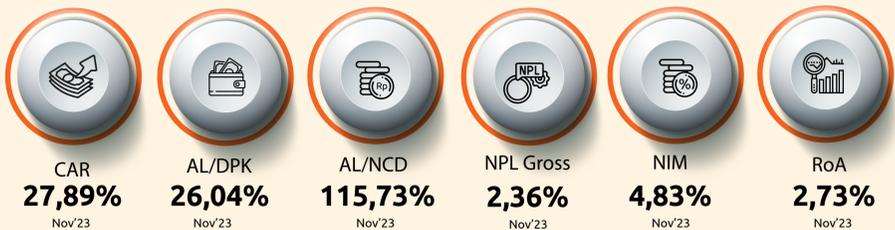
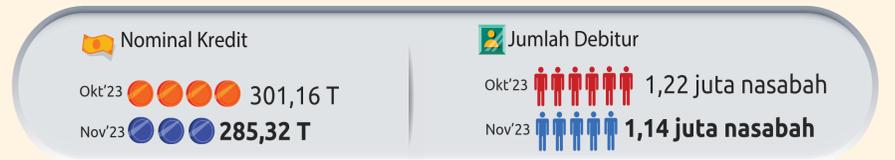
494.254 ton CO2e Volume Unit



PERBANKAN



Kredit restrukturisasi Covid-19 terus menurun





PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIIAN (PPDP)

3,56% yoy

Pendapatan Premi Asuransi



6,19% yoy

Aset Dana Pensiun



8,60% yoy

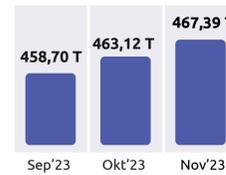
Aset Perusahaan Penjaminan



LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

14,14% yoy

Piutang Pembiayaan



18,05% yoy

Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending



-2,61% yoy

Pembiayaan Modal Ventura



TWP 90 Fintech P2P Lending

2,81%

Nov'23

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan

2,21x

Nov'23

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross)

2,54%

Nov'23

INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO (IAKD)

80 Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang tercatat di OJK



PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN EDUKASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

319.416 layanan
(Januari s.d Desember 2023)

115 pengaduan berindikasi pelanggaran

2.326 sengketa masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

23.064 pengaduan



Selesai oleh Internal Dispute Resolution 89,44%; Dalam Proses 10,56%

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal



2.288 entitas keuangan ilegal dihentikan

9.380 Pengaduan Investasi Ilegal

Investasi Ilegal

40

Investasi Ilegal

388

Pinjaman Online Ilegal

2.248

Pinjaman Online Ilegal

8.991

(Januari s.d Desember 2023)

Program literasi dan edukasi keuangan (Januari s.d Desember 2023)

Kegiatan Edukasi

• **2.619** kegiatan
• **650.791** peserta

Sikapi Uangmu

• **430** konten Edukasi
• **2.003.462** penonton

LMSKU OJK

• **48.919** kali akses modul
• **39.261** sertifikat kelulusan modul

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah



515
Desember 2023

34 provinsi

477 kabupaten/kota
(93,58 persen dari kabupaten/kota di Indonesia)

ARAH KEBIJAKAN OJK



Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Meminta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tetap mencermati *downside risk* dan secara berkala melakukan uji ketahanan dalam rangka mengukur kemampuan dalam menyerap potensi risiko yang terjadi.



Kebijakan Penguatan SJK dan Infrastruktur Pasar

- Menerbitkan POJK mengenai:
 - Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAKI) di Pasar Modal
 - Layanan Digital Oleh Bank Umum (POJK LDBU)
 - Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
 - Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
 - Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah
 - Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun
 - Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
- Menerbitkan SEOJK mengenai:
 - Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum (SEOJK *Digital Maturity Assessment for Bank/SEOJK DMAB*)
 - Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun
 - Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial (DJS)
- Menyempurnakan ketentuan terkait BPR/S yang mengatur mengenai *Exit Policy* BPR/S dan Kualitas Aset BPR.
- Menyampaikan surat penegasan implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Calon Pihak Utama Bank Umum dan implementasi SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Bekerja sama dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) meluncurkan kajian pemanfaatan teknologi di sektor asuransi.
- Bekerja sama dengan *Korea Deposit Insurance Corporation* (KDIC) dan *Korea Insurance Development Institute* (KIDI) untuk memperluas kerja sama internasional di bidang pengembangan bidang perasuransian.
- Melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka memperkuat ekosistem industri kesehatan dengan mengoptimalkan dukungan dari sektor jasa keuangan, termasuk diantaranya melalui penyediaan produk/layanan asuransi kesehatan yang berkualitas.



Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Edukasi Pelindungan Konsumen (PEPK)

- Meluncurkan Peta Jalan Pengawasan PEPK 2023-2027.
- Menerbitkan ketentuan penyempurnaan mengenai Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Menyusun arah kebijakan internal dalam melakukan percepatan dalam pemberian layanan konsumen dan masyarakat terintegrasi di sektor jasa keuangan.
- Melaksanakan berbagai program edukasi literasi dan inklusi Keuangan kepada beberapa segmen masyarakat rentan (*vulnerable segments*), yaitu segmen perempuan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyandang Disabilitas dan masyarakat di wilayah perdesaan.
- Meraih predikat sebagai Badan Publik dengan kategori Informatif terbaik nasional kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada tahun 2023 sejalan dengan komitmen keterbukaan informasi kepada publik melalui sejumlah perbaikan dan peningkatan layanan.
- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melakukan penahanan dua tersangka kasus investasi ilegal INOX (*Investasi No Hoax*) di Kantor Polres Lombok Timur.

ARAH KEBIJAKAN OJK



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

Berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia dan industri perbankan syariah, secara proaktif terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, melalui beberapa program meliputi Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS).



Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD)

- Menyusun rancangan peraturan mengenai penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan mekanisme Penyelenggaraan *Regulatory Sandbox*.
- Mempersiapkan peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dalam sebuah Tim Transisi yang akan dikoordinasikan oleh OJK.
- Mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital, penguatan ekosistem digital yang berkelanjutan, serta praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, khususnya terkait dengan penerapan *Artificial Intelligence* di sektor ITSK.
- Sedang dalam penyusunan *Memory of Understanding* dengan sejumlah pihak dalam rangka penguatan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan ITSK dan aset keuangan digital termasuk aset kripto.



Penguatan Tata Kelola

- Pendelegasian kewenangan ke Kantor OJK daerah dalam mendukung fungsi perizinan dan pengawasan.
- Menerapkan sertifikasi program Ahli Pembangun Integritas (API), serta memperoleh penghargaan dari KPK dalam beberapa tahun ke belakang terkait sistem pengendalian gratifikasi dan pengelolaan LHKPN terbaik.
- Terus memelihara dan menguatkan integritas di seluruh Satuan Kerja di OJK melalui perluasan sertifikasi dan *surveillance* ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) OJK tahun 2023.
- Terus melaksanakan penguatan fungsi Manajemen Risiko, khususnya terkait pengembangan *framework*, metodologi, kompetensi, dan budaya Manajemen Risiko OJK (MROJK).
- Menerapkan *continuous improvement* dengan penetapan ketentuan internal tentang penguatan pengendalian kualitas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.



Penanganan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perhatian Khusus

- Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), antara lain dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 59/PUU-XX/2023 tanggal 21 Desember 2023 terkait kewenangan penyidikan.
- Memperkuat upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan dengan menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023, OJK mengenakan sanksi administratif sebanyak 4.317 dan 75 Perintah Tertulis.
- Data 2014 s.d 28 Desember 2023, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 116 perkara (91 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 20 perkara IKNB). 89 perkara telah diputus oleh pengadilan (82 perkara *in kracht* dan 7 perkara tahap kasasi)

Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil.